Analisis Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Data Statistik Tahun 2023

krisdianto[1], gustirandi[2]
[12] Sistem Informasi,Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,Universitas Islam Indragiri
Email: krisdiantocc@gmail.com[1], gustirandi787@gmail.com[2],

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengidentifikasi isu-isu utama yang memengaruhi capaian pendidikan di daerah tersebut. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2024), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Pendidikan melalui indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan jumlah fasilitas pendidikan.Isu pokok yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi rendahnya proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi (hanya 3,71%), tingginya persentase masyarakat yang tidak/belum sekolah (33,76%), dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi akibat minimnya fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Rata-rata lama sekolah masyarakat hanya mencapai 7,18 tahun, setara dengan jenjang SMP kelas 2, yang menunjukkan tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar-menengah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data sekunder, serta pendekatan korelasional untuk melihat keterkaitan antara ketersediaan fasilitas pendidikan dengan capaian tingkat pendidikan masyarakat. Visualisasi data melalui Power BI digunakan untuk memperjelas distribusi pendidikan secara spasial dan demografis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara keterbatasan jumlah sekolah lanjutan dan perguruan tinggi dengan rendahnya capaian pendidikan tinggi di masyarakat. Selain itu, persebaran fasilitas yang tidak merata memperburuk kesenjangan pendidikan antarkecamatan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi kebijakan berbasis data, seperti peningkatan jumlah sekolah menengah dan tinggi, penyediaan beasiswa pendidikan, serta program literasi dan sekolah paket untuk masyarakat dewasa.

Kata kunci: pendidikan, Indragiri Hilir, lama sekolah, fasilitas pendidikan, analisis spasia

ABSTRACT

This study aims to map the educational attainment of the population in Indragiri Hilir Regency and identify key issues affecting educational outcomes in the region. The data were obtained from the Civil Registry Office (2024), the Central Bureau of Statistics (BPS), and the Ministry of Education, using indicators such as average years of schooling, expected years of schooling, and the number of educational facilities.The main issues identified include the low proportion of the population with higher education (only 3.71%), a high percentage of individuals who have never attended school (33.76%), and limited access to secondary and higher education due to a lack of educational facilities, especially in rural areas. The average years of schooling is only 7.18 years—equivalent to the second year of junior high school—indicating a high dropout rate during the basic to intermediate educational levels.This research adopts a descriptive quantitative approach using secondary data analysis, along with correlational analysis to explore the relationship between the availability of educational facilities and the population's educational attainment. Data visualization using Power BI is employed to illustrate the spatial and demographic distribution of education levels.

The results show a clear correlation between the limited number of higher-level schools and the low rate of higher education attainment. In addition, the uneven distribution of educational infrastructure

exacerbates educational disparities between districts. These findings provide a critical evidence base for local government policy interventions, such as increasing the number of secondary and higher education institutions, offering education scholarships, and implementing literacy and non-formal education programs for adults.

Keywords: education, Indragiri Hilir, years of schooling, educational facilities, spatial analysis

1 PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, tingkat pendidikan masyarakat berperan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, tingkat produktivitas, serta kesiapan menghadapi tantangan global. Namun, hingga saat ini, ketimpangan pendidikan antarwilayah di Indonesia masih menjadi persoalan serius, khususnya di daerah dengan infrastruktur terbatas seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah pesisir dengan kondisi geografis yang tersebar, yang berdampak langsung pada aksesibilitas layanan pendidikan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2024, proporsi masyarakat yang belum atau tidak pernah mengenyam pendidikan mencapai 33,76% dari total penduduk, sedangkan hanya sekitar 3,71% yang menyelesaikan pendidikan tinggi (D1 ke atas). Rata-rata lama sekolah hanya mencapai 7,18 tahun, yang setara dengan jenjang SMP kelas dua. Ketimpangan ini diperparah dengan keterbatasan jumlah dan distribusi fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang menengah atas dan perguruan tinggi, yang masih sangat minim.Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang mendalam terkait akses, ketersediaan sarana-prasarana, dan persebaran layanan pendidikan yang belum merata. Dalam jangka panjang, rendahnya tingkat pendidikan ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang berbasis data dan kajian yang komprehensif untuk memahami akar permasalahan serta merumuskan solusi yang tepat sasaran.Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemetaan kondisi pendidikan masyarakat Indragiri Hilir secara terukur dan sistematis sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif. Dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan visualisasi data menggunakan Power BI, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran statistik, tetapi juga mampu menyoroti ketimpangan pendidikan secara spasial dan demografis. Hasil analisis ini akan menjadi kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, serta mendukung program nasional dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Rasionalisasi kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan nyata akan data dan analisis pendidikan yang akurat, terkini, dan relevan dengan kondisi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.1 Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (2020), pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPMr), bersama dengan kesehatan dan pendapatan. Pendidikan tidak

hanya berfungsi sebagai sa ana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak langsung pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, pengangguran struktural, serta ketimpangan sosial (Todaro & Smith, 2015).

1.2 Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah Tertinggal

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama pembangunan pendidikan di daerah tertinggal adalah keterbatasan akses fisik terhadap lembaga pendidikan (Suharti, 2013). Hal ini meliputi jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, kualitas pendidikan yang rendah seringkali ditandai dengan rasio guru-murid yang tidak ideal, kualifikasi guru yang kurang memadai, dan keterbatasan sarana belajar (Kemendikbud, 2022).

1.3 Hubungan antara Fasilitas Pendidikan dan Capaian Pendidikan

Penelitian oleh Hanushek & Woessmann (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan dengan tingkat capaian pendidikan siswa. Daerah yang memiliki lebih banyak sekolah dan tenaga pengajar berkualitas cenderung menunjukkan capaian pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, persebaran dan kuantitas fasilitas pendidikan menjadi faktor kunci dalam pemerataan pendidikan.

1.4 Visualisasi Data Pendidikan dan Pendekatan Berbasis Data

Dalam era digital, penggunaan alat analisis dan visualisasi data seperti Power BI memungkinkan penyajian data pendidikan yang lebih informatif, interaktif, dan mudah dipahami (Mertens, 2019). Ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, terutama di tingkat daerah yang membutuhkan bukti empirik untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif deskriptif dan korelasional**, dengan tujuan utama untuk menggambarkan distribusi tingkat pendidikan masyarakat serta menganalisis hubungan antara ketersediaan fasilitas pendidikan dan capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, metode **visualisasi data spasial** melalui Power BI digunakan untuk memberikan pemetaan interaktif dan mendalam terhadap kondisi pendidikan di wilayah tersebut.

Rancangan kegiatan penelitian dilakukan dalam tiga tahap:

- **Tahap I:** Pengumpulan data sekunder dari instansi pemerintah dan lembaga statistik.
- **Tahap II:** Pengolahan dan analisis data menggunakan perangkat lunak statistik dan visualisasi (Excel, SPSS, dan Power BI).
- **Tahap III:** Penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi berbasis data.

1. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh wilayah administratif **Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**, dengan fokus pada:

- Distribusi jenjang pendidikan penduduk.
- Persebaran fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi).
- Indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Objek penelitian adalah **penduduk Kabupaten Indragiri Hilir** yang tercatat dalam data kependudukan dan pendidikan pada tahun 2023–202

Tabel Distribusi Tingkat Pendidikan (2024)

kecamatan	jumlah SD	jumlah SMP	jumlah SMA	jumlah tidak sekolah
Tembilahan	48	15	10	21,5
Batang tuaka	42	8	6	19
gaung	40	5	3	20,3
pulau burung	35	3	2	18,8
kateman	28	7	5	16,2
Teluk belengkong	26	4	2	15,1

Mayoritas penduduk berada pada jenjang **Tamat SD atau belum tamat sekolah dasar**. Hanya sekitar **3,7%** yang mencapai pendidikan tinggi (D1–S3).**Lebih dari sepertiga (33,76%)** penduduk belum pernah mengenyam bangku sekolah formal. Menunjukkan adanya tantangan besar dalam peningkatan pendidikan menengah dan tinggi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Diagram garis**

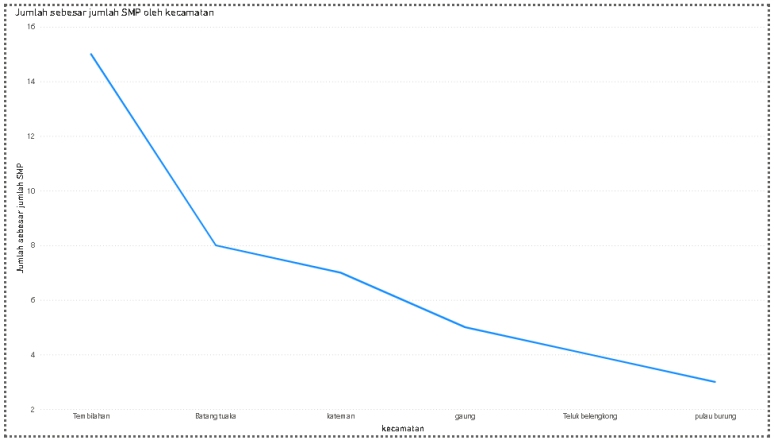

Diagram garis di atas menampilkan jumlah SMP (Sekolah Menengah Pertama) di beberapa kecamatan. Sumbu horizontal (X) menunjukkan nama-nama kecamatan, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah SMP yang ada di masing-masing kecamatan.

Rincian Data:

1. Tembilahan memiliki jumlah SMP tertinggi, yaitu sekitar 15 sekolah.

2. Batang Tuaka berada di urutan kedua dengan sekitar 8 SMP.

3. Kateman memiliki sekitar 7 SMP.

4. Gaung memiliki jumlah SMP yang lebih sedikit, sekitar 5 SMP.

5. Teluk Belengkong tercatat memiliki sekitar 4 SMP.

6. Pulau Burung merupakan kecamatan dengan jumlah SMP paling sedikit, yaitu 3 SMP.

Kesimpulan:

Tembilahan merupakan kecamatan dengan fasilitas pendidikan tingkat SMP paling banyak.

Terdapat penurunan jumlah SMP secara bertahap dari Tembilahan ke Pulau Burung

Ini bisa mencerminkan tingkat kepadatan penduduk atau akses pendidikan di tiap wilayah.

- **Diagram Batang**

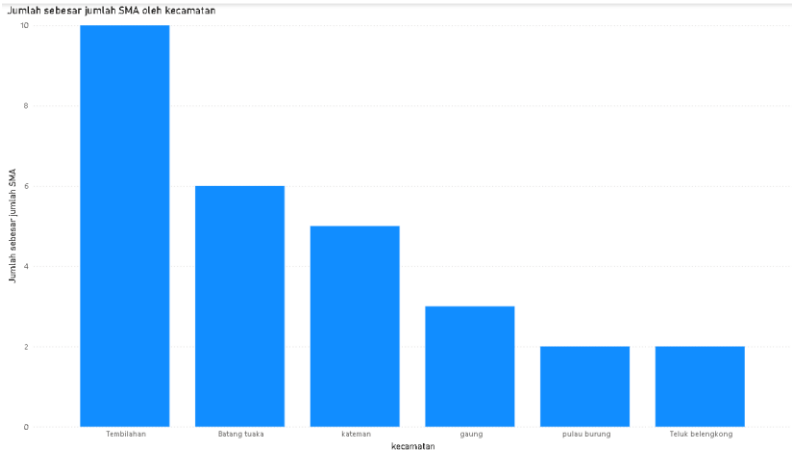

Diagram batang tersebut menunjukkan perbandingan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Sumbu horizontal (X) mewakili nama-nama kecamatan, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah SMA yang ada di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Kecamatan Tembilahan memiliki jumlah SMA terbanyak, yaitu sebanyak 10 sekolah. Ini menunjukkan bahwa Tembilahan sebagai pusat kabupaten memiliki akses pendidikan tingkat atas yang lebih baik dibanding kecamatan lainnya.

Kecamatan Batang Tuaka menempati posisi kedua dengan jumlah SMA sebanyak 6 sekolah, disusul Kateman dengan 5 sekolah.

Kecamatan Gaung hanya memiliki sekitar 3 SMA, sementara Pulau Burung dan Teluk Belengkong memiliki jumlah yang sama yaitu 2 SMA.

Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara Tembilahan dan kecamatan lain dalam hal ketersediaan SMA.

Kesimpulannya, distribusi SMA di Kabupaten Indragiri Hilir belum merata, di mana kecamatan pusat lebih unggul dibandingkan wilayah-wilayah pinggiran. Hal ini dapat berdampak pada akses pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa di daerah terpencil.

- **Diagram lingkaran**

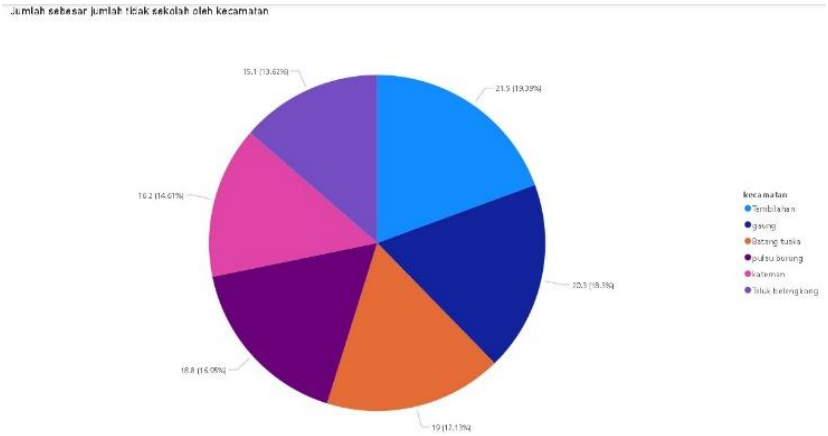

Diagram lingkaran tersebut menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang tidak sekolah di beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Masing-masing sektor pada diagram menunjukkan proporsi (jumlah dan persentase) penduduk tidak sekolah dari setiap kecamatan

ecamatan Tembilahan memiliki jumlah penduduk tidak sekolah tertinggi sebesar 21,5 (19,39%). Ini menunjukkan bahwa meskipun Tembilahan memiliki jumlah SMA terbanyak (lihat diagram batang sebelumnya), masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh penduduk usia sekolah.

Kecamatan Gaung menyumbang 20,3 (18,3%) dari total penduduk yang tidak sekolah, hampir menyamai Tembilahan.

Kecamatan Batang Tuaka memiliki kontribusi sebesar 19 (17,13%).

Kecamatan Pulau Burung menyumbang 18,8 (16,95%) dari total penduduk yang tidak sekolah.

Kecamatan Kateman berkontribusi sebesar 16,2 (14,61%).

Kecamatan Teluk Belengkong memiliki jumlah paling sedikit dalam kelompok ini, yaitu 15,1 (13,62%).

Kesimpulan:

Tidak ada kecamatan yang memiliki persentase ekstrem rendah dalam jumlah penduduk tidak sekolah; semuanya berada dalam rentang 13–19%.

3 KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang signifikan. Berdasarkan data Dukcapil tahun 2024 dan sumber resmi lainnya, ditemukan bahwa proporsi penduduk yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal mencapai 33,76%, sementara hanya 3,71% yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi (D1 ke atas). Rata-rata lama sekolah hanya mencapai 7,18 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berhenti mengenyam pendidikan pada jenjang SMP.

Analisis korelasional menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara ketersediaan fasilitas pendidikan dan tingkat capaian pendidikan masyarakat. Kecamatan-kecamatan dengan jumlah sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan penduduk yang lebih rendah pula. Selain itu, visualisasi data menggunakan Power BI berhasil memberikan gambaran yang lebih jelas dan interaktif mengenai kesenjangan pendidikan antar wilayah di Indragiri Hilir.

Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang berbasis data, termasuk peningkatan jumlah dan persebaran sekolah, penguatan infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa, serta perluasan program pendidikan non-formal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayah pesisir dan daerah tertinggal seperti Indragiri Hilir.

REFERENSI

[1] E. Susrianto Indra Putra, "IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH DASAR (Studi Kasus di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau).," *Edukasi*, vol. 8, no. 1, pp. 32–48, 2020, doi: 10.32520/judek.v8i1.1107.

[2] S. R. Hasibuan, I. Harahap, and K. Tambunan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara," *J. Manaj. Akunt.*, vol. 3, no. 1, pp. 272–285, 2023, doi: 10.36987/jumsi.v3i1.4023.

[3] S. Suryana, "Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan," *Edukasi*, vol. 14, no. 1, 2020, doi: 10.15294/edukasi.v14i1.971.

[4] D. Satria, I. H. Kusasih, and G. Gusmaneli, "Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini : Suatu Kajian Literatur," vol. 3, 2025.

[5] M. W. Alyusra and G. Hb, "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis , Kec Tembilahan

[6] Yelly Zamaya and Dahlan Tampubolon, "Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri Untuk Mendukung Pembangunan Daerah," *J. Niara*, vol. 14, no. 2, pp. 101–111, 2021, doi: 10.31849/niara.v14i2.6248.

[7] L. Oktanata, "Disparitas Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Di Tahun Pandemi," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: 10.33005/jdep.v5i1.310.

[8] T. Handhayani, S. Informasi, U. Tarumanagara, T. Informatika, and U. Tarumanagara, Design to Monitor the Number of Students of the Faculty of Information Technology , TaY.

Patandung and S. Panggua, "Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional," *J. Sinestesia*, vol. 12, no. 2, pp. 794–805, 2022.

[9] rumanagara University," vol. 28, no. 2, pp. 396–402, 2025, doi: 10.46984/sebatik.v28i2.1942.

[10] T. Rombot, C. Mamahit, J. Ticoh, and N. Sangi, "Hubungan Fasilitas dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Bidang Studi Semester 1 Pendidikan Teknik Elektro," *J. EDUNITRO J. Pendidik. Tek. Elektro*, vol. 2, no. 2, pp. 115–122, 2022, doi: 10.53682/edunitro.v2i2.4417.